

**Judul** : DPR Happy dana riset naik jadi 12 triliun  
**Tanggal** : Minggu, 18 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

# DPR Happy Dana Riset Naik Jadi Rp 12 Triliun

Senayan menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah dana riset perguruan tinggi sebesar Rp 12 triliun pada tahun 2026. Jumlah tersebut naik Rp 4 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8 triliun.

ANGGOTA Komisi XI DPR Muhammad Khalid menilai, keputusan tersebut akan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, inovasi, dan peningkatan nilai tambah industri nasional.

Namun, peningkatan anggaran harus diarahkan secara terintegrasi dengan kebutuhan strategis industri nasional. Sehingga, hasil riset tidak berhenti pada kuantitas publikasi akademik semata, tetapi berujung pada lahirnya teknologi, produk, dan solusi nyata.

"Riset juga harus ditempatkan sebagai instrumen utama transformasi ekonomi. Karena dari sanalah lahir inovasi, industrialisasi berbasis teknologi, dan penguatan daya saing nasional," kata Khalid dalam keterangan-nya, Sabtu (17/1/2026).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi dana riset dan inovasi sebesar Rp 4 triliun untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga, total dana riset dan inovasi pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp 12 triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan para akademisi yang terdiri dari, rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri maupun swasta di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Khalid melanjutkan, keputusan tersebut menandai menguatnya komitmen negara untuk mengejar ketertinggalan struktural Indonesia dalam bidang inovasi. Terlebih berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) per Maret 2025, belanja riset Indonesia masih berada di kisaran 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah tersebut jauh di bawah sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand yang telah mendekati 1 persen, serta Singapura yang mencapai sekitar 1,8 persen dari PDB. "Perbandingan ini harus dibaca secara jujur dan objektif," kata sekretaris jenderal (sekjen) DPP PKS ini.

Dia menambahkan, hampir semua negara yang berhasil membangun basis industri kuat dan ekonomi bernilai tambah tinggi

menjadikan riset sebagai prioritas fiskal jangka panjang. Karena itu, peningkatan dana riset perguruan tinggi tidak dipandang sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional.

"Riset harus menjadi jembatan antara dunia akademik, kebutuhan industri, dan agenda hilirisasi sumber daya nasional," saran anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.

Kebijakan Presiden Prabowo tersebut juga menjadi momentum membangun ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha. Yang paling penting mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan nilai tambah tinggi.

Khalid mengingatkan negara-negara yang unggul saat ini adalah negara yang puluhan tahun lalu secara konsisten menjadikan riset sebagai mesin industrialisasi dan kemajuan. "Indonesia harus bergerak lebih cepat dan lebih berani ke arah tersebut," tandasnya.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, dirinya senang ada pertemuan antara Presiden dengan ruband pimpinan

perguruan tinggi. Pertemuan itu sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah dan kaum intelektual.

Tradisi komunikasi langsung antara kepala negara dan pimpinan akademisi sangat krusial agar informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat tersampaikan secara utuh dan transparan. "Keputusan Presiden itu sebagai budaya baru yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan keilmuan," puji-nya, kemarin.

Namun, forum semacam ini tidak boleh hanya menjadi acara seremonial semata, harus diformat sedemikian rupa agar menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif. Sehingga, para pimpinan perguruan tinggi diberikan ruang yang luas untuk memberikan masukan konstruktif secara langsung kepada Presiden.

"Masukan dari para pakar ini sangat dibutuhkan untuk memastikan arah kebijakan negara tetap berada di jalur yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," tandas politikus PKS ini.

Dampak positif dari komunikasi langsung tersebut sudah terlihat nyata dengan adanya kebijakan konkret terkait anggaran riset. Di mana, Presiden Prabowo langsung memberikan

perhatian serius terhadap dunia penelitian. Anggaran dana riset kini mencapai Rp12 triliun dari sebelumnya Rp 8 triliun.

"Kenaikan signifikan ini menunjukkan pemahaman mendalam Presiden bahwa pembangunan sebuah negara yang maju harus memiliki landasan riset yang kuat dan teruji," ucapnya senang.

Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penambahan anggaran dana riset diharapkan dapat memperkuat riset di seluruh universitas di Indonesia. Tambahan anggaran ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas riset, termasuk riset yang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Presiden meminta agar pemanfaatan dana riset difokuskan pada sektor-sektor prioritas nasional," ujar Prasetyo di Istana, Kamis (15/1/2026).

Prasetyo berharap, penambahan dana riset mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi, serta mempercepat proses industrialisasi dan hilirisasi, yang tahun ini akan mulai dilakukan groundbreaking besar-besaran. "Tentu ini membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," tutup Prasetyo. ■ TIF